

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KILOGRAM DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir)

Rafika Norjanah¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Moh. Fajar Noorrahman³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : rafikanorjanah@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir) masih kurang baik karena tidak pernah dilakukan pengawasan dan sosialisasi dari dinas perindustrian dan perdagangan kepada pangkalan dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir) dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, penarikan informan dilakukan secara *purposive sampling* yang berjumlah 10 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir) kurang baik. Dilihat dari beberapa indikator yakni : transmisi/penyaluran komunikasi kurang baik, kejelasan informasi kurang baik, konsistensi cukup baik, staf cukup baik, informasi kurang baik, wewenang cukup baik, fasilitas cukup baik, pengangkatan birokrasi cukup baik, insentif kurang baik, *Standar Operatting Procedures* (SOP) kurang baik, fragmentasi/tanggung jawab kurang baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat. Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Distribusi Gas LPG 3 KG

ABSTRACT

Implementation of 3 kg LPG Gas Distribution Policy in Lampihong District Balangan Regency (Case Study at base in Batu Merah village and Kusambi Hilir village) it is still not good because there has never been supervision and outreach from the industry and trade service to the base and the community. The aim of this research is to find out how the 3 kg lpg gas distribution policy is impelementation in lampihong district balangan regency (case study at base in batu merah village and kusambi hilir village) and the influencing factors. The research method used was a qualitative descriptive approach, the withdrawal of informants was carried out by purposive sampling, totaling 10 informants. The results of this research indicate that the implementation of 3 kg lpg gas distribution policy in lampihong district balangan regency (case study at base in batu merah village and kusambi hilir village) is not good. Judging from several indicators, namely: transmission is not good, clarity of information is not good, consistency is good enough, staff is good enough, information is not good, authority is good enough, facilities is good enough, bureaucratic appointments is good enough, incentive is noot good, Standard operating procedures (SOP) is not good, fragmentation is not good. Inhibiting factors are lack of socialization to the community, lack of public awareness. The supporting factors is that coordination between implementing agencies runs well.

Keywords : Implementation, Policy, Distribution of 3 kg LPG Gas

PENDAHULUAN

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg merupakan salah satu komoditas sektor migas yang di produksi oleh PT. Pertamina (Persero) yang kemudian disubsidikan dengan penuh oleh pemerintah supaya para konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG. Penggunaan LPG sebagai

pengganti minyak tanah, selain bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin juga bisa menekan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini di tanggung oleh APBN, selain itu pemakaian LPG tidak menimbulkan polusi yang berlebihan.

Pemerintah mengambil kebijakan ini untuk mengurangi penggunaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak melalui program konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), program konversi minyak tanah ke Elpiji 3 kilogram di mulai pada sejak tahun 2007 sampai sekarang tetap berjalan meskipun penuh dengan dinamika. Selama 17 Tahun konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg bersubsidi kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT. Pertamina Persero. Elpiji digunakan sebagai kebutuhan untuk memasak dikarenakan jumlah minyak tanah di Indonesia sudah berkurang bahkan sulit didapatkan oleh masyarakat sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Oleh karna itu pemerintah menetapkan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) sebagai bahan bakar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masyarakat untuk kedepannya harus beralih dari minyak tanah ke Gas (LPG).

Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* LPG 3 kg sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat apabila pendistribusian tidak sesuai dengan standar maka dapat menimbulkan penyimpangan seperti penyalahgunaan dan tindak kriminal terhadap LPG 3 kg sehingga menyebabkan kelangkaan pasokan LPG 3 kg. Oleh karna itu maka pemerintah menyiapkan sistem penyaluran LPG 3 kg tersebut hingga dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pemerintah melalui Pertamina selaku pelaksana kegiatan pengadaan dan penyaluran Lpg 3 kg ini telah menyiapkan suatu sistem penyaluran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pihak Pertamina telah menciptakan sistem penyaluran yaitu dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang merupakan perusahaan tempat pengisian elpiji kemudian Agen yang merupakan perusahaan distributor besar dan terakhir adalah pangkalan yang merupakan ujung tumbak penyaluran LPG 3 kg ini. Pihak pemerintah melalui Pertamina juga telah menentukan besarnya harga yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Dengan sistem ini pemerintah mengharapkan masyarakat dapat menikmati bahan bakar dengan harga yang murah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka diberi kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Begitupun Kabupaten Balangan dengan otonomi daerah tersebut menjadikan harapan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan distribusi gas lpg 3 kg di kecamatan lampihong kabupaten balangan agar menjadi lebih efektif karena tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah. Namun dalam implementasi kebijakan distribusi gas lpg 3 kg di kecamatan lampihong kabupaten balangan (studi kasus pada pangkalan di desa batu merah dan kusambi hilir) mengalami permasalahan seperti kurangnya sosialisasi sehingga tidak tepat sasaran dalam penyaluran gas elpiji kepada masyarakat miskin, adanya masyarakat yang membeli gas elpiji 3 kg lebih dari satu dalam satu kali pembelian. Hal ini juga terlihat dari beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dari (Andini, 2023) yang berjudul Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 kg (Studi di kecamatan siabu Kabupaten Mandiling Natal) yang hasil implementasi pada gas lpg 3 kg tersebut memiliki permasalahan yaitu kelangkaan LPG 3 Kg yang sering terjadi di masyarakat Kecamatan Siabu, penggunaan LPG yang tidak tepat sasaran. Kemudian Siti Rahmatul Azizah, 2017 yang berjudul Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang memiliki permasalahan yaitu kelangkaan LPG 3 kg yang sering terjadi di masyarakat dan Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan distribusi gas lpg 3 kg di kecamatan lampihong kabupaten balangan (studi kasus pada pangkalan di desa batu merah dan kusambi hilir) untuk memperoleh informasi dan mencari solusi terkait implementasi kebijakan distribusi gas lpg 3 kg. Sehingga dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan saran, evaluasi dan informasi terkait Implementasi kebijakan Distribusi Gas LPG 3 kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir)

KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut David Easton (dalam Suaib, 2016:16) bukunya yang berjudul “Pengantar Kebijakan Publik” menjelaskan bahwa Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah atau paksa kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya menurut Friedrick (dalam Suaib,2016:16) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hoogerweft dalam (Kartawidjaja, 2018) berpendapat bahwa kebijakan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu yang tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan instansi pemerintah.

Thomas R.Dye dalam (Ridha, 2016) ‘Kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah’. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan itu ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

(Anggara, 2018) kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi banyak orang pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, adalah mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak umumnya melalui suatu proses pemilihan untukbertindak atas nama masyarakat banyak. Kemudian kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kebijakan publik menurut James E. Anderson dalam (Ridha, 2016) sebagai serangkaian dalam tindakan yang mempunyai suatu tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu permasalahan tertentu.

Lebih lanjut dikatakan Anderson adalah 5 elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi suatu tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah terhadap masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.

Dari beberapa pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

(Zaenudin,2014:19) Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksana keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan dimulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara lain (mengacu pada enam sumber daya pokok manajemen menurut George R. Terry (dalam (Mulyadi, 2016), yakni:

1. *Men (Human Resources)*, dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
2. *Money (Finances)*, dalam manajemen publik, *money* sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
3. *Material (Logistik)*,
4. *Machine (information)*, manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
5. *Methods (legitimate)*, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. *Market (Participation)*, partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses dan implementasi kebijakan publik.

Menurut Abdul Wahab (dalam Tahir,2015:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Howleyt dan Ramesh dalam (Zaenudin, 2014) 'implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya penterjemahan dari rencana ke dalam praktek'.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Agustino, 2017) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai 'Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan'.

Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya tujuan dan sasaran.

- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
- 3) Adanya hasil kegiatan.

Menurut George Edwards III dalam (H.Sitomurang, 2016) 'Implementasi Kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya'.

Dalam beberapa pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu.

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan antara satu sama lain.

Menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu

1. Komunikasi

keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi menurut Edward III, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

- a Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah satu pengertian, hal ini dikarenakan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan teristorsi ditengah jalan.
- b Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c Konstensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsesten . Ini karena jika pemerintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam implementasi kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari elemen-elemen, yaitu:

- a Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya

dikarenakan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
 - c Wewenang, Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
 - d Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi/Sikap

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi/sikap, menurut Edwar III, yaitu:

- a Efek disposisi, Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan.
- b Melakukan pengaturan birokrasi dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga mode *bypassing* personil.
- c Insentif, Edward III menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut dapat terlaksana atau teralisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a Membuat *Standar Operating Procedure* (SOP) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b Melakukan Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

METODE

Penelitian ini dilakukan di desa Batu Merah dan Kusambi Hilir Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Raya Lampihong Paringin KM5 Kode Pos 71661

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penggalan data didapat melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

Sasaran Penelitian

Penelitian memfokuskan kepada beberapa aspek Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi/Sikap
4. Struktur Birokrasi

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2018) dokumentasi adalah kumpulan peristiwa yang sudah terjadi dalam bentuk tulisan, foto/gambar atau karya monumental dari seseorang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) yang terdiri dari:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Peneliti melakukan penjelelahan awal terhadap objek penelitian ini sehingga semua yang ditekankan direkam untuk mendapatkan data yang beragam.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Setelah mendapatkan data yang cukup, langkah selanjutnya adalah mereduksi data dengan merangkum dan melilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah masih dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Distribusi GAS LPG 3 Kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir)

Studi Implementasi Merupakan Suatu Kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan rumit bahkan tidak jarang juga bermuatan politis dengan adanya intervensi dan campur tangan dari berbagai kepentingan yang saling mencoba memanfaatkan situasi.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi dari tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) mengatakan bahwa ada 4 (empat) variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Komunikasi yang terdiri dari indikator: Transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan kebijakan dan konsistensi. Indikator transmisi/penyaluran komunikasi masih kurang baik disebabkan karena berdasarkan observasi dan wawancara tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada pangkalan dan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula.

Indikator Kejelasan kebijakan masih kurang baik disebabkan karena kejelasan kebijakannya sudah jelas tetapi masyarakat tidak mengerti apa isi dari kebijakannya karena tidak pernah dilakukan sosialisasi. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membengungkan (kalimat-kalimat yang disampaikan tidak ambigu/bermakna mendua).

Indikator konsistensi cukup baik karena isi dari kebijakan distribusi gas elpiji 3 kilogram untuk masyarakat miskin, isi dari kebijakannya juga tidak berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan

teori George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) pemerintah pembuat kebijakan haruslah jelas dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten, karena jika pemerintah yang diberikan berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan. Dan sumber daya tak terbarukan.

Sumber daya yang terdiri dari indikator : Staf, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas. Indikator staf kurang baik karena stafnya tidak pernah datang ke pangkalan dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2017:138) kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi suatu kebijakan salah satunya disebabkan karena bagian staf yang tidak kompeten dalam bidangnya.

Indikator informasi masih kurang baik karena tidak ada sosialisasi. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2017:138) informasi ada dua macam yaitu informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Indikator wewenang cukup baik karena wewenang kebijakan ini diberikan kepada dinas perindustrian dan perdagangan diamanahi untuk kelancaran distribusi, pemeliharaan, pembinaan pengawasan sesuai dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2017:139) wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Indikator Fasilitas cukup baik karena pangkalan sudah memadai dan adanya mobil truk khusus pengangkut distribusi gas elpiji 3 kg. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III (dalam Agustini, 2017:139) jika fasilitas yang dimiliki telah mencukupi dan memadai serta mengetahui apa yang harus dikerjakannya, wewenang yang diberikan juga telah terlegitimasi, sementara fasilitas pendukung (sarana dan prasarana).

3. Disposisi/Sikap

Disposisi adalah instruksi singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) suatu atau surat masuk. Disposisi dibuat oleh pemimpin untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian atau otoritas mereka. Tindak lanjut bisa dalam bentuk surat balasan, tindakan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Disposisi/Sikap yang terdiri dari indikator: Pengangkatan birokrasi dan Insentif. Indikator Pengangkatan birokrasi cukup baik karena pelaksanaan kebijakannya sudah paham akan kebijakannya. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2017) pemilihan dan pengangkatan birokrasi haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi pada kebijakan dan kepentingan warga.

Indikator intensif kurang baik karena tidak ada insentif/bonus yang diberikan kepada staf/pegawai, hanya diberikan sesuai gaji namun tidak ada lebih atau insentif lain. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) salah satu teknik yang disarankan Edward, dalam mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal tugas-tugas yang dikelompokkan

ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan yang mengikut.

Struktur birokrasi yang terdiri dari indikator: *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan Fragmentasi/Tanggung jawab. Indikator Standar Operating Prosedures (SOP) kurang baik karena tidak ada SOP. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik dapat dilakukan dengan adanya SOP.

Indikator fragmentasi/tanggung jawab kurang baik karena tidak ada pengawasan. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C. Edward III dalam (Agustino, 2017) tanggung jawab yang tak lain adalah upaya penyebaran tanggung jawab dalam kegiatan birokrat diantara beberapa unit kerja.

Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir)

1. Faktor Pendukung

a Adanya Koordinasi antar Badan Pelaksana Berjalan dengan baik

adanya koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik hubungan antara dinas perindustrian dan perdagangan, agen serta pangkalan sudah berjalan dengan baik mengenai mereka selalu bekerjasama untuk memantau ketersediaan stok gas elpiji 3 kg agar tidak terjadi kelangkaan di pangkalan

2. Faktor Penghambat

a Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

penyaluran komunikasi yang kurang baik disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari dinas perindustrian dan perdagangan kepada pangkalan dan masyarakat secara langsung, kurangnya kejelasan akibat tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, Sehingga masih ada masyarakat yang kurang memahami akan kebijakan-kebijakan tentang gas lpg 3 kg ini.

b Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang siapa sasaran dari kebijakan ini. Kesadaran masyarakat diperlukan agar mereka tau siapa yang berhak menerima subsidi ini. Kebanyakan kasus tidak tepatnya sasaran karena memang banyak masyarakat mampu yang juga ikut membeli gas bersubsidi ini.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir) masih kurang baik. Dilihat dari beberapa hal diantaranya mengenai variabel-variabel yang terbagi menjadi beberapa indikator: transmisi/penyaluran komunikasi kurang baik, kejelasan kurang baik, konsistensi, cukup baik, staf kurang baik, informasi kurang baik, wewenang cukup baik, fasilitas cukup baik, pengangkatan birokrasi cukup baik, insentif kurang baik, Standar Operating Prosedures (SOP) kurang baik, fragmentasi/tanggung jawab kurang baik. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir) antara lain: faktor pendukung adanya koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik. Kemudian faktor penghambat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir) itu disarankan Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan agar melakukan pengawasan di setiap pangkalan hal ini bertujuan agar pangkalan tidak menjual harga di atas eceran tertinggi, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan distribusi gas lpg 3 kg ini agar masyarakat lebih paham sasaran tujuan dari kebijakan ini mengarah kemana. Kepada Pemilik pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir di sarankan agar mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang kebijakan distribusi gas elpiji 3 kilogram dan menjalankan amanah dalam memberikan gas elpiji bersubsidi kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut dan menjual gas elpiji 3 kg sesuai dengan surat keputusan gubernur kalimantan selatan dengan harga yang sudah ditentukan yaitu Rp. 18.500. Kepada Masyarakat Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan di sarankan agar bisa memahami tentang isi dari kebijakan ini, yaitu kebijakan gas elpiji 3 kg ini ditujukan untuk masyarakat dengan rumah tangga miskin dan usaha mikro, jadi apabila kalian mampu dalam hal ekonomi sebaiknya menggunakan gas elpiji 5,5 kg non subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Ederan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188/44 / 0385 / KUM / 2022. Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV, Alfabeta.

Andini, D. (2023). *Implementasi Peraturan Presiden 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandiling Natal*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekhali Hasan Ahma.

Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.



- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.
- H.Sitomurang, G. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute.
- Kartawidjaja, D. (2018). *Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Bandung: CV, AKFABETA.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Kosep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. . Bandung: cv, ALFABETA.
- Ridha, M. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ridha, Muhammad. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik Yogyakarta* : . (n.d.). Calpulis.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Zaenudin, D. M. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. . Yogyakarta.: Pustaka Pelajar.
- Siti Rahman Azizah (2017). *Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Skripsi Pada Universitas Terbuka Jakarta*.